

Dampak Kerjasama Kontraterorisme Filipina – Amerika Serikat di Mindanao (2022-2023)

Senia Nur Agista

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
2210631260061@student.unsika.ac.id

Gili Argenti

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
gili.argenti@fisip.unsika.ac.id

Abstract

This study analyzes the impact of Philippine-US counterterrorism cooperation in Mindanao during the period 2022–2023, using a neoliberal institutionalism approach and the concept of international regimes. The results show that cooperation between the two countries not only survived after the US withdrawal from Afghanistan, but actually intensified through the strengthening of legal frameworks such as EDCA, joint military exercises, and intelligence and capacity building support. This cooperation is symbiotic: the Philippines receives security and economic support, while the US strengthens its influence in the Indo-Pacific region. Although the counterterrorism approach is still dominated by military aspects, there are efforts to address the root causes of the conflict through civil-military programs. This study concludes that the institutionalized cooperation regime has succeeded in creating stability and trust, although its sustainability depends on the ability of both countries to integrate security approaches with economic development in Mindanao.

Keywords: Cooperation, Counterterrorism, Impact, Philippines-US, Neoliberalism

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak kerjasama kontraterorisme Filipina-AS di Mindanao pada periode 2022–2023, dengan menggunakan pendekatan neoliberal institusionalisme Robert O. Keohane dan konsep rezim internasional dari Stephen D. Krasner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama kedua negara tidak hanya bertahan pasca-penarikan AS dari Afghanistan, tetapi justru semakin intensif melalui penguatan kerangka hukum seperti EDCA, latihan militer bersama, serta dukungan intelijen dan pembangunan kapasitas. Kerjasama ini bersifat simbiosis: Filipina mendapat dukungan keamanan dan ekonomi, sementara AS memperkuat pengaruhnya

Article History: Received 30 September 2025, Revised 15 October 2025,
Accepted 31 October 2025, Available online 01 November 2025

Copyright: © 2025. The Authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International

di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun pendekatan kontra terorisme masih didominasi oleh aspek militer, terdapat upaya untuk menyentuh akar konflik melalui program *civil-military*. Studi ini menyimpulkan bahwa rezim kerjasama yang terinstitusionalisasi berhasil menciptakan stabilitas dan kepercayaan, meski keberlanjutannya bergantung pada kemampuan kedua negara untuk mengintegrasikan pendekatan keamanan dengan pembangunan ekonomi di Mindanao.

Kata Kunci: Dampak, Filipina-AS, Kerjasama, Kontra terorisme, Neoliberalisme

Pendahuluan

Isu terorisme di Mindanao berakar dari konflik panjang antara pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak Muslim Moro yang menuntut otonomi serta pengakuan hak-hak mereka¹. Mindanao, sebagai pulau terbesar kedua di Filipina, secara historis menjadi wilayah hunian mayoritas kaum Muslim atau suku Moro seperti Maranao dan Tausug². Konflik ini dipicu oleh perjuangan panjang kaum Moro melawan penjajahan Spanyol, Amerika, Jepang, dan pemerintah Filipina yang mayoritas Katolik, dengan tujuan mempertahankan identitas budaya dan agama serta menuntut kemerdekaan atau otonomi³. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh kaum Muslim di Mindanao, yang sering mengalami marginalisasi dan kemiskinan, memperparah situasi dan memperkuat gerakan separatis yang telah berlangsung selama ratusan tahun⁴.

Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kelompok-kelompok teroris Islamis seperti Abu Sayyaf dan Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan jaringan teror global. Kelompok-kelompok ini menggantikan peran kelompok pejuang kemerdekaan yang lebih moderat seperti *Front Pembebasan Islam Moro* (MILF). Abu Sayyaf dikenal sebagai kelompok yang paling terkenal dan paling sulit dipahami, menjadi sumber ketegangan keamanan di Mindanao dan kawasan Asia Tenggara⁵. Konflik bersenjata antara pemerintah Filipina dan berbagai faksi pemberontak Muslim telah menyebabkan ribuan korban jiwa, dengan peristiwa-peristiwa penting seperti pembantaian Jabidah pada 1969 dan pembentukan *Front Pembebasan Nasional Moro* (MNLF) serta MILF yang menandai eskalasi konflik yang berkelanjutan hingga abad ke-21⁶.

Selain itu, Mindanao dan wilayah sekitarnya juga menjadi pusat aktivitas maritim ilegal seperti pembajakan yang berhubungan erat dengan terorisme⁷. Kelompok teroris di Mindanao memiliki tradisi maritim yang kuat, sehingga ancaman terorisme di wilayah ini juga terkait dengan keamanan laut di Asia Tenggara⁸. Dinamika politik lokal dan nasional, termasuk upaya pembentukan wilayah otonomi seperti Bangsamoro, menjadi bagian dari usaha meredakan

ketegangan⁹. Namun, perpecahan internal di antara kelompok pemberontak dan keberadaan kelompok radikal terus menjadi tantangan besar bagi stabilitas dan keamanan di Mindanao.

Hubungan Filipina dan Amerika Serikat (AS) berakar dari masa kolonial sejak 1898, dan tetap erat setelah Filipina merdeka pada 1946, terutama di bidang pertahanan. Posisi strategis Filipina di Asia Pasifik menjadikannya sekutu penting AS, khususnya menghadapi ketegangan Laut Cina Selatan dan ancaman terorisme di Asia Tenggara. Kerja sama ini dilembagakan melalui *Mutual Defense Treaty* (1951), *Visiting Forces Agreement* (1998), dan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (2014), serta diperkuat dengan bantuan militer, ekonomi, dan latihan bersama seperti *Balikatan* dan *Joint Special Operations Task Force–Philippines* (JSOTF-P)¹⁰.

Serangan 11 September 2001 yang menewaskan 3.000 orang mendorong AS meluncurkan *Global War on Terrorism* (GWOT). Dalam konteks Asia Tenggara, jaringan Al-Qaeda berafiliasi dengan kelompok lokal seperti Jamaah Islamiyah, *Abu Sayyaf Group* (ASG), serta kelompok lain di Filipina selatan (MILF, MNLF, Maute, BIFF, KIM) yang memperburuk keamanan. Bahkan kelompok komunis *New People's Army* (NPA) juga masuk daftar teroris. AS menetapkan Filipina sebagai sekutu utama non-NATO dan menyebut kawasan ini sebagai *second front* dalam GWOT. Dukungan AS berupa pelatihan, intelijen, dan bantuan sipil mencerminkan sinergi kepentingan: AS ingin menjaga stabilitas regional, sementara Filipina membutuhkan dukungan untuk memperkuat pertahanan dan mengatasi akar konflik domestik.

Penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan pada Agustus 2021 menjadi titik balik penting dalam politik global¹¹. Proses evakuasi yang kacau, kembalinya Taliban berkuasa, dan keruntuhan cepat pemerintahan Kabul memunculkan keraguan besar terhadap reliabilitas jaminan keamanan AS¹². Peristiwa ini bukan hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga memengaruhi persepsi sekutu dan mitra strategis AS di seluruh dunia. Di kawasan Indo-Pasifik, perdebatan segera mengemuka: apakah keluarnya AS dari Afghanistan melambangkan menurunnya komitmen globalnya, atau justru memperlihatkan upaya Washington untuk memfokuskan kembali strategi ke persaingan kekuatan besar, khususnya menghadapi Tiongkok¹³.

Bagi Asia Tenggara, khususnya Filipina, momentum Afghanistan mengandung ambivalensi. Di satu sisi, kekacauan tersebut memunculkan pertanyaan serius: dapatkah AS dipercaya untuk terus berkomitmen dalam

jangka panjang? Di sisi lain, Filipina juga menyadari bahwa keluarnya AS dari Afghanistan membuka ruang bagi Washington untuk lebih menyalurkan sumber daya ke Indo-Pasifik. Analisis dari ISEAS menegaskan bahwa meski kredibilitas AS tergores, mayoritas negara di Asia melihat pentingnya tetap menjaga hubungan erat dengan Washington sebagai penyeimbang Tiongkok¹⁴.

Dalam domain kontraterorisme, kerja sama Filipina–AS memiliki sejarah panjang. Sejak awal 2000-an, kedua negara berkolaborasi menghadapi *Abu Sayyaf Group* (ASG), Jamaah Islamiyah, serta kemudian kelompok afiliasi ISIS di Mindanao. Bentuknya antara lain melalui JSOTF-P, latihan gabungan Balikatan, serta berbagai program pelatihan dan intelijen. Namun, setelah penarikan Afghanistan, bentuk kerja sama mengalami *recalibration*. Sejak 2015, pasukan tempur AS sudah tidak lagi ditempatkan langsung di Mindanao. Dukungan beralih pada pelatihan teknis, intelijen, penyediaan peralatan, serta bantuan sipil untuk memperkuat legitimasi pemerintah Filipina di wilayah konflik¹⁵.

Pada periode 2022–2023, di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr., kerja sama Filipina–AS justru menguat dalam bentuk yang lebih luas. Pada April 2023, diumumkan ekspansi *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) dengan empat lokasi baru, yang meningkatkan fleksibilitas logistik dan latihan militer. Latihan Balikatan 2023 menjadi yang terbesar dalam sejarah, menekankan skenario pertahanan eksternal, bantuan kemanusiaan, sekaligus modul kontra-terorisme. Hal ini memperlihatkan bahwa kontraterorisme tetap menjadi bagian penting, tetapi “dibundel” dalam kerangka modernisasi aliansi yang lebih besar, yang juga berorientasi pada penangkalan Tiongkok¹⁶.

Meski begitu, pengalaman Afghanistan menimbulkan kehati-hatian baru bagi Manila. Terdapat kesadaran bahwa komitmen AS bisa berubah, sehingga Filipina menekankan otonomi operasional dalam menghadapi ancaman domestik. Strategi ini berfungsi ganda: memanfaatkan dukungan teknis dan finansial dari AS, sekaligus menghindari ketergantungan mutlak. Di sisi lain, meningkatnya tekanan Tiongkok di Laut Cina Selatan membuat Filipina tetap melihat AS sebagai sekutu vital, meski dengan pendekatan lebih realistis. Konsep ini sejalan dengan strategi hedging, yaitu menjaga hubungan baik dengan AS tanpa menutup kemungkinan manuver fleksibel dalam menghadapi kekuatan lain¹⁷.

Dengan demikian, penarikan AS dari Afghanistan tidak mengakhiri kerja sama kontraterorisme Filipina–AS, melainkan mendorong *recalibration* yang lebih hati-hati. Kerja sama tetap berjalan, berfokus pada pelatihan, intelijen, dan

bantuan sipil, namun ditempatkan dalam kerangka aliansi yang lebih luas dan dengan penekanan pada kemandirian Filipina. Periode 2022–2023 menunjukkan bahwa meski kredibilitas AS sempat terguncang, aliansi dengan Filipina tetap bertahan karena adanya kebutuhan timbal balik: AS membutuhkan sekutu strategis di Asia Tenggara, sementara Filipina memerlukan dukungan dalam menjaga keamanan domestik serta menghadapi tantangan geopolitik di Laut Cina Selatan.

Terdapat beberapa jurnal yang juga membahas mengenai hal serupa, pertama *“Comparative of Governance in Terrorism Policy Implementation in Indonesia and Philippines - Santoso, R. A., Hazizah, W., Rizky, M., dkk”* dimana jurnal ini secara garis besar membandingkan implementasi kebijakan terorisme di Indonesia dan Filipina, dua negara di Asia Tenggara yang memiliki kemiripan dalam sejarah terorisme dan karakteristik sosio-politik. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pendekatan, kerangka hukum, tantangan, serta peran kelembagaan dan lingkungan eksternal dalam penanggulangan terorisme di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi kombinasi pendekatan keras (penegakan hukum) dan lunak (deradikalisasi), sementara Filipina lebih dominan menggunakan pendekatan militeristik dan represif. Meskipun keduanya memiliki dasar hukum yang kuat, jurnal ini menyoroti adanya tantangan dalam koordinasi antar-lembaga dan perlindungan hak asasi manusia, terutama di Filipina yang kebijakan antiterorismenya menuai kritik terkait potensi pelanggaran HAM.¹⁸ Secara keseluruhan, jurnal menyimpulkan pentingnya regulasi yang lebih adil dan preventif, sinergi antar-pemangku kepentingan, serta optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan terorisme tanpa mengorbankan hak asasi manusia.

Kedua *“Motivasi dan Apropriasi Taktik: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina”* oleh Maulidita, Salismi Zulfi, Fauziah Novita, dan Indah Putri Hikmah yang diterbitkan *Sentris: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2023): 135-145. Ini menyajikan analisis mendalam mengenai fenomena *“crime-terrorism”* melalui studi kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Secara garis besar, penelitian ini mengkaji bagaimana kelompok teroris, seperti Abu Sayyaf, beradaptasi dengan perubahan sosial dan zaman, beralih dari tujuan ideologis murni ke aktivitas kriminal transnasional. Jurnal ini secara khusus menyoroti motivasi di balik pergeseran ini dan taktik-taktik yang diadopsi oleh Kelompok Abu Sayyaf untuk melancarkan operasinya.

Fokus utama jurnal ini terletak pada dua aspek krusial: motivasi dan apropriasi taktik Kelompok Abu Sayyaf. Pertama, penelitian ini menemukan bahwa motivasi utama Kelompok Abu Sayyaf untuk terlibat dalam kejahatan terorganisir adalah kebutuhan mendesak untuk mendanai operasi mereka dan menopang kehidupan anggota setelah terputusnya aliran dana dari sponsor eksternal. Kedua, jurnal ini menguraikan taktik-taktik spesifik yang digunakan oleh kelompok tersebut, yang meliputi serangan bom, penculikan, pemerasan, serta penyediaan keamanan untuk kegiatan ilegal seperti budidaya dan perdagangan ganja. Dengan demikian, jurnal ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kelompok teroris dapat berfungsi sebagai sindikat kejahatan transnasional, mengintegrasikan kekerasan politik dengan aktivitas kriminal demi kelangsungan hidup dan keuntungan finansial¹⁹.

Ketiga Jurnal "*From Aquino to Marcos: political survival and Philippine foreign policy towards China*" oleh Alvin Camba, yang diterbitkan dalam *Journal of Contemporary East Asia Studies*, menganalisis bagaimana Filipina merumuskan kebijakan luar negerinya terhadap Tiongkok. Penulis berargumen bahwa pendekatan Filipina terhadap Tiongkok dibentuk oleh kombinasi politik domestik, pertimbangan geopolitik, dan realitas ekonomi, yang semuanya dinuansakan melalui lensa kelangsungan hidup politik para pemimpin. Secara khusus, para pemimpin Filipina cenderung memanfaatkan kritik atau penyimpangan dari kebijakan Tiongkok pemerintahan sebelumnya untuk mempertahankan kekuasaan, yang sering kali menghasilkan pembalikan atau modifikasi kebijakan.

Jurnal ini secara empiris mengkaji tiga administrasi kepresidenan: Benigno Aquino III (2010–2016) yang mengambil sikap anti-Tiongkok karena skandal korupsi dan insiden Laut Cina Selatan; Rodrigo Duterte (2016–2022) yang beralih ke pendekatan pro-Tiongkok, didorong oleh kritik terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan kurangnya dukungan AS, serta memanfaatkan hubungan untuk keuntungan ekonomi seperti perjudian online; dan Ferdinand Marcos Jr. (2022-) yang, meskipun diharapkan pro-Tiongkok, justru menunjukkan pergeseran ke arah kepentingan AS sebagai strategi untuk melemahkan faksi Duterte dan merespons sentimen publik terhadap isu-isu terkait Tiongkok.

Dengan demikian, studi ini menyoroti bahwa kelangsungan hidup politik pemimpin adalah faktor penentu utama dalam menjelaskan fluktuasi kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok²⁰.

Penelitian-penelitian yang ada mengenai Filipina telah memberikan kontribusi penting dengan menganalisis aspek-aspek kebijakan *counter-terrorism*, evolusi taktik kelompok teroris dan dinamika kebijakan luar negeri yang didorong oleh kelangsungan politik domestik²¹.

Berdasarkan penelitian ini dapat ditemukan bagaimana penelitian tersebut relevan dengan judul ini, yaitu dapat menganalisis bagaimana sebuah instrumen kebijakan luar negeri (kerjasama dengan AS) yang lahir dari konteks politik tertentu (pergeseran Marcos Jr.) memengaruhi penanganan sebuah ancaman keamanan spesifik (seperti Abu Sayyaf di Mindanao) dalam hal tata kelola dan efektivitas.

Dari ketiga jurnal tersebut belum ada yang secara spesifik membahas mengenai dampak kerjasama kontraterorisme Filipina-AS di Mindanao 2022 – 2023. Oleh karena itu, isu ini penting untuk diteliti guna memahami akar penyebab konflik dan terorisme di Mindanao secara komprehensif, serta untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan Amerika Serikat setelah penarikan pasukan dari Afghanistan terhadap kerjasama kontraterorisme dengan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam hubungan bilateral kedua negara serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerjasama keamanan dan stabilitas regional.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan memperkaya literatur mengenai hubungan internasional dan kontraterorisme di Asia Tenggara. Penelitian ini juga bermanfaat bagi organisasi keamanan regional dan internasional dalam memahami dinamika terorisme di. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di wilayah yang terdampak konflik.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data bersifat kualitatif, lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif ini juga mengutamakan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti ²². Sejalan dengan pendekatan tersebut, penelitian ini juga didasarkan pada kerangka teoritis yang memperkuat analisis. Penelitian ini berlandaskan pada teori utama neoliberalisme institusionalisme dengan konsep rezim internasional. Konsep *regime cooperation* menurut Robert O. Keohane berangkat dari pandangan neoliberalisme institusional bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis, kerja sama antarnegara tetap dimungkinkan ²³.

Kerja sama tersebut difasilitasi oleh apa yang disebut sebagai rezim internasional, yakni seperangkat prinsip, norma, aturan, serta prosedur pengambilan keputusan yang disepakati negara-negara untuk mengatur isu tertentu dalam hubungan internasional. ²⁴ Dengan adanya rezim, negara dapat menyesuaikan kepentingan masing-masing dalam kerangka aturan bersama yang mengurangi ketidakpastian, meningkatkan transparansi, dan memberikan stabilitas pada interaksi internasional ²⁵.

Melalui rezim internasional, kerja sama dapat berlangsung karena biaya transaksi dalam negosiasi berkurang, informasi dapat diakses lebih terbuka, dan kepatuhan terhadap kesepakatan lebih mudah ditegakkan meskipun tidak ada otoritas pusat yang memaksa. Keohane (1984) menekankan bahwa rezim menyediakan mekanisme yang membuat negara lebih percaya bahwa pihak lain akan memenuhi komitmennya, sehingga masalah *cheating* atau *free rider* dapat diminimalisasi. Dengan demikian, *regime cooperation* bukan sekadar bentuk koordinasi pragmatis, melainkan juga suatu proses institusionalisasi kerja sama yang memungkinkan negara memperoleh keuntungan kolektif dalam jangka panjang.

Dalam konteks hubungan internasional, *regime cooperation* dapat dilihat pada berbagai bidang, mulai dari perdagangan, keamanan, hingga lingkungan. Misalnya, dalam kerja sama perubahan iklim di bawah kerangka *Paris Agreement*, negara-negara bersedia menurunkan emisi karena adanya norma global, transparansi laporan, serta mekanisme evaluasi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa rezim internasional berfungsi sebagai penopang utama bagi keberlangsungan kerja sama, karena tanpa rezim, negara akan cenderung hanya mengejar kepentingan jangka pendek dan sulit membangun kepercayaan timbal balik ²⁶.

Kombinasi teori dan konsep ini sangat relevan untuk menganalisis kerjasama kontraterorisme Filipina-AS. Teori neoliberalisme institusionalisme dan konsep rezim internasional cocok untuk menganalisis kasus ini karena keduanya mampu menjelaskan bagaimana kerjasama Filipina-AS dapat terjalin, dipelihara, dan memberikan dampak nyata meski berada dalam sistem internasional yang anarkis. Mereka menyoroti pentingnya aturan, institusi, dan norma internasional yang memperkuat kepercayaan, mengurangi ketidakpastian, serta menjamin keuntungan absolut bagi kedua negara.

Hasil dan Pembahasan

Kerjasama kontraterorisme antara Filipina dan Amerika Serikat di Mindanao pada periode 2022-2023 menawarkan sebuah studi kasus yang sangat kompleks dan multidimensional dalam hubungan keamanan internasional. Pentingnya penelitian mendalam terhadap isu ini pertama-tama terletak pada upaya untuk memahami akar penyebab konflik dan terorisme di Mindanao secara komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh *International Crisis Group* (2022), konflik di Mindanao bukan semata-mata masalah keamanan, melainkan merupakan produk dari kelindan faktor historis, ekonomi, dan sosio-kultural yang kompleks, termasuk warisan kolonial, marginalisasi politik masyarakat Muslim Moro, kemiskinan struktural, dan persaingan klaim atas sumber daya alam²⁷.

Dengan demikian, analisis terhadap kerjasama kontraterorisme ini harus melihat beyond operasi militer semata dan mengevaluasi sejauh mana pendekatan yang diambil oleh kedua negara mampu menyentuh akar permasalahan ini, atau justru hanya berfokus pada gejala permukaannya saja.

Kedua, isu ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks perubahan besar kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca penarikan pasukan dari Afghanistan pada Agustus 2021. Peristiwa ini menandai sebuah momen reorientasi strategis kebijakan kontraterorisme global AS, meninggalkan pendekatan intervensi militer besar-besaran (*large-scale counterinsurgency*) menuju model yang lebih ringan kaki (*light footprint*) dan berbasis kemitraan (*by, with, and through*). Penelitian ini akan menganalisis dampak perubahan kebijakan ini terhadap intensitas, skala, dan karakter kerjasama kontraterorisme AS dengan Filipina, serta menilai apakah penarikan dari Afghanistan justru mengalihkan perhatian dan sumber daya AS ke *front* kontraterorisme lain seperti Mindanao, atau justru mengurangi komitmen Washington²⁸.

Neoliberal Institusionalisme dan Rezim Internasional

Untuk menganalisis fenomena ini, teori Neoliberal Institusionalisme memberikan kerangka kerja yang sangat robust. Teori ini, yang dibangun di atas karya seminal Robert Keohane dalam *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (1984), berargumen bahwa dalam kondisi anarki internasional yang tidak adanya pemerintah global negara-negara tetap dapat melakukan kerjasama yang mendalam dan berkelanjutan karena mereka termotivasi oleh keuntungan absolut (*absolute gains*) dan keinginan untuk mengurangi biaya transaksi serta ketidakpastian²⁹.

Keohane (1984) menekankan bahwa institusi internasional dalam arti luas sebagai seperangkat aturan formal dan informal diciptakan *precisely* untuk memfasilitasi kerjasama ini dengan menyediakan informasi yang simetris, menciptakan mekanisme untuk memantau kepatuhan (*monitoring compliance*), dan mengurangi kemungkinan perilaku menyimpang (*cheating*).

Dalam konteks kerjasama kontraterorisme Filipina-AS, institusi-institusi ini membentuk apa yang dalam literatur Hubungan Internasional disebut sebagai sebuah rezim internasional. Stephen Krasner (1982) mendefinisikan rezim internasional sebagai "seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang *implicit* atau *explicit* di sekitar mana harapan-harapan para aktor berkumpul dalam sebuah bidang hubungan internasional tertentu"³⁰.

Rezim antara Manila dan Washington tidak berbentuk dalam satu organisasi tunggal, melainkan merupakan sebuah jaringan kompleks dan saling terkait dari perjanjian-perjanjian bilateral, komitmen politik tingkat tinggi, dan praktik-praktik operasional yang telah terinstitusionalisasi selama beberapa dekade.

Penerapan Teori Neoliberal Institusionalisme dalam Kerja Sama Kontraterorisme Filipina–AS

Keberadaan dan kekuatan rezim kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Filipina pada periode 2022–2023 dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator konkret yang mencerminkan konsolidasi prinsip, norma, dan prosedur kelembagaannya. Secara prinsip dan aturan formal, rezim ini berakar pada dua instrumen hukum utama, yaitu *Visiting Forces Agreement* (VFA) tahun 1999 dan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) tahun 2014. Kedua perjanjian tersebut menjadi pondasi legal yang memungkinkan penempatan dan aktivitas militer Amerika Serikat di Filipina dalam kerangka yang menghormati kedaulatan nasional negara tuan rumah. Dalam periode 2022–

2023, terjadi penguatan dramatis terhadap kerangka hukum ini. Pemerintahan Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., yang awalnya diperkirakan akan mengambil sikap hati-hati terhadap Washington, justru menunjukkan arah kebijakan yang lebih proaktif dalam memperkuat kemitraan pertahanan dengan Amerika Serikat. Puncaknya terjadi pada Februari 2023, ketika kedua negara mengumumkan penambahan empat lokasi baru dalam kerangka EDCA di luar lima situs yang telah ada sebelumnya. Lokasi-lokasi baru ini tersebar di wilayah strategis, termasuk Pulau Luzon yang berhadapan langsung dengan Selat Taiwan serta beberapa daerah di Mindanao yang dekat dengan kawasan konflik. Keberadaan situs-situs ini tidak hanya memiliki signifikansi strategis, tetapi juga memperluas fungsi rezim kerja sama tersebut sebagai pusat pelatihan, pangkalan logistik, dan tempat penyimpanan peralatan militer yang siap digunakan dalam operasi bersama secara cepat dan terkoordinasi.

Selain kerangka hukum yang kuat, keberlanjutan rezim ini juga ditopang oleh norma dan nilai yang disepakati kedua pihak. Norma utama yang membimbing kerja sama tersebut adalah prinsip *division of labor* atau pembagian peran yang saling melengkapi berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara. Amerika Serikat memanfaatkan keunggulan teknologi militer dan sumber daya finansialnya untuk menyediakan *capacity building*, pelatihan berstandar tinggi, serta dukungan intelijen, *surveillance*, dan *reconnaissance* (ISR) yang canggih, termasuk penggunaan wahana nirawak seperti MQ-1B *Gray Eagle*. Selain itu, AS turut memberikan dukungan pendanaan melalui berbagai inisiatif seperti *Counterterrorism Financing* dan *Law Enforcement Programs*. Di sisi lain, Filipina memberikan kontribusi penting berupa pengetahuan medan, legitimasi domestik, serta pasukan darat dari Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) yang melaksanakan operasi langsung di lapangan. Dalam kerangka ini, prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional tetap dijaga dengan ketat: seluruh operasi ofensif dilaksanakan di bawah komando dan kendali pemerintah Filipina, sementara personel Amerika berperan sebagai penasihat, pelatih, dan pendukung teknis.

Selanjutnya, kekokohan rezim ini juga terlihat dari prosedur pengambilan keputusan dan mekanisme koordinasi yang telah terinstitusionalisasi dengan baik. Beragam forum dan instrumen kelembagaan telah dibentuk untuk menjamin kesinambungan komunikasi dan evaluasi antara kedua negara. Salah satu wujud paling nyata adalah latihan militer tahunan *Balikatan*, yang pada tahun 2023 tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah dengan melibatkan

lebih dari 17.600 personel dari kedua negara. Di samping itu, terdapat pula dua forum utama, yaitu *Mutual Defense Board* (MDB) dan *Security Engagement Board* (SEB), yang secara rutin menyusun rencana, melakukan koordinasi, dan mengevaluasi seluruh aspek kerja sama pertahanan, termasuk bidang kontraterorisme. Pada tingkat yang lebih operasional, keberadaan *Joint United States Military Assistance Group* (JUSMAG) Philippines berfungsi sebagai penghubung permanen yang memastikan koordinasi harian berjalan lancar, terutama dalam hal pelatihan, bantuan teknis, serta transfer peralatan militer.

Dengan demikian, pada periode 2022–2023, rezim kerja sama pertahanan Amerika Serikat–Filipina menunjukkan tingkat konsolidasi yang semakin matang. Kekuatan rezim ini tidak hanya terletak pada keberadaan instrumen hukum formal, tetapi juga pada internalisasi norma yang saling menguntungkan dan prosedur kelembagaan yang efektif dalam menjaga kesinambungan serta adaptivitas kerja sama di tengah dinamika keamanan regional yang semakin kompleks.

Mekanisme Operasional dan Pendekatan terhadap Akar Konflik

Mekanisme kerjasama intelijen merupakan tulang punggung operasi kinetik yang presisi. Dukungan intelijen real-time dari Amerika Serikat terbukti krusial dalam serangkaian operasi "pencarian dan penetrasi" (*kill/capture operations*) yang berhasil menetralkan sejumlah target tinggi dari kelompok Abu Sayyaf dan *Bangsamoro Islamic Freedom Fighters* (BIFF) pada awal 2023. Operasi ini didukung oleh kemampuan pengawasan canggih, sebagaimana terungkap dalam insiden pada awal 2025 di mana sebuah pesawat *Beechcraft Super King Air B300* yang dikontrak oleh Departemen Pertahanan AS dan menjalankan misi "intelijen, pengawasan, dan pengintaian" mengalami kecelakaan di Maguindanao del Sur³¹. Keberadaan pesawat *surveilans* ini menandakan kedalaman dan teknisnya dukungan intelijen yang diberikan, meskipun juga memicu kritik dari kelompok masyarakat Filipina yang menilai hal tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan.

Mekanisme operasional tidak hanya bergantung pada pendekatan kekuatan, tetapi juga melalui Program Operasi Sipil-Militer (CMO) yang bertujuan memenangkan "hati dan pikiran" (*winning hearts and minds*) masyarakat lokal. Program-program seperti "*Operation Smile*" yang memberikan operasi bibir sumbing gratis dan "*Engineering Civic Action Program* (ENCAP)" yang membangun sekolah serta fasilitas air bersih, difasilitasi oleh militer AS. Upaya ini mengakui bahwa keamanan yang berkelanjutan mustahil

tercapai hanya dengan senjata. Tujuannya adalah membangun kepercayaan dan mengurangi dukungan masyarakat terhadap kelompok militan dengan langsung meningkatkan kondisi hidup mereka di daerah yang sering terjepit antara kelompok bersenjata dan pasukan keamanan.

Pendekatan holistik dalam mekanisme kerjasama juga diwujudkan dengan mendukung proses perdamaian formal di bawah payung *Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao* (BARMM). Pemerintah Filipina mendorong persatuan di jajaran kepemimpinan BARMM dan mendesak militer untuk bertransformasi dari peran tempur menjadi peran pendukung perdamaian³². Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menekankan bahwa dengan persatuan, otoritas transisi akan berhasil memfasilitasi pemerintahan yang berpusat pada tata kelola baik dan perdamaian abadi. Dukungan Indonesia dan peran organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dalam mendorong dialog perdamaian di Filipina Selatan juga merupakan bagian dari ekosistem diplomasi yang memperkuat kerangka ini³³.

Sejalan dengan upaya perdamaian tersebut, kerjasama ini juga menghasilkan dampak bilateral yang bersifat simbiosis dan strategis. Bagi Filipina, manfaatnya adalah peningkatan kapasitas keamanan yang nyata, membaiknya stabilitas internal di Mindanao yang merupakan prasyarat mutlak bagi investasi dan pembangunan ekonomi di wilayah tertinggal tersebut serta penguatan posisi tawar Manila dalam menghadapi tantangan keamanan lain, khususnya klaim maritimnya di Laut China Selatan³⁴. Bagi Amerika Serikat, kemitraan ini adalah batu penjur (cornerstone) dari strategi *engagement*-nya di kawasan Indo-Pasifik, yang berfungsi untuk memproyeksikan pengaruhnya, mengontrerasikan pengaruh China, menjaga kebebasan navigasi di jalur laut vital, dan mempertahankan *presence* strategisnya di sebuah lokasi geopolitik yang kritis dengan menggunakan model kemitraan yang lebih *sustainable* dan *less costly* dibandingkan intervensi langsung.

Menganalisis dampak penarikan pasukan dari Afghanistan terhadap kerjasama ini membutuhkan nuansa. Bertentangan dengan kekhawatiran bahwa AS mungkin akan menarik diri secara global, bukti pada periode 2022-2023 justru menunjukkan bahwa penarikan dari Afghanistan berdampak pada pengintensifan dan pemurnian (*refinement*) komitmen kontraterorisme AS di teater lain seperti Filipina.

Penarikan tersebut menandai konsolidasi strategis menuju model *over-the-horizon counterterrorism* yang mengandalkan kekuatan mitra lokal yang

diperkuat oleh dukungan AS yang presisi, berteknologi tinggi, dan ringan kaki. Filipina, dengan infrastruktur institusional (VFA/EDCA) yang sudah mapan dan sejarah kemitraan yang panjang, menjadi laboratorium ideal dan mitra utama untuk menerapkan model baru pasca-Afghanistan ini.

Alih-alih mengabaikan Filipina, penarikan dari Afghanistan justru dalam beberapa hal membebaskan sumber daya diplomatik, militer, intelijen, dan finansial AS untuk dialihkan dan dikonsentrasikan ke kawasan yang dipandang lebih strategis secara geopolitik dalam persaingan kekuatan besar, yaitu Indo-Pasifik³⁵. Oleh karena itu, komitmen AS justru semakin menguat, sebagaimana tercermin dari alokasi dana yang terus meningkat melalui program-program seperti *Foreign Military Financing* (FMF) dan *International Military Education and Training* (IMET) untuk Filipina, serta percepatan implementasi EDCA pasca-2021 yang menunjukkan bahwa Mindanao menjadi prioritas dalam peta kontra terorisme global AS yang telah direvisi³⁶.

Penutup

Melalui perspektif neoliberal institusionalisme, kerjasama kontra terorisme Filipina-AS di Mindanao pada 2022-2023 merupakan perwujudan dari sebuah rezim internasional yang efektif dan resilien. Rezim yang dibangun di atas aturan formal, norma, dan prosedur yang terinstitusionalisasi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan bersama tetapi juga berhasil bertahan bahkan menguat dalam menghadapi gejolak perubahan kebijakan global AS pasca-Afghanistan.

Temuan ini membuktikan tesis utama neoliberal institusionalisme bahwa institusi mampu menciptakan stabilitas dan mengurangi ketidakpastian dalam politik internasional. Namun, Keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dari kerjasama ini akan sangat bergantung pada kemampuan kedua negara untuk terus memperdalam dan memperluas rezim kerjasama mereka, tidak hanya di bidang keamanan semata, tetapi juga dengan memperkuat pilar-pilar kerjasama ekonomi dan pembangunan yang mampu menyentuh akar ketidakstabilan di Mindanao, sehingga terorisme tidak lagi menemukan lahan subur untuk tumbuh

References

- Abinales, Patricio N., and Donna J. Amoroso. *State and Society in the Philippines*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2005.
- Abuza, Zachary. *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2005.

- Aggarwal, Vinod K., and Jonghyuk Lee. "Afghanistan and the Future of US Credibility in Asia." *ISEAS Perspective* (2022). <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/afghanistan-and-the-future-of-us-credibility-in-asia/>.
- . *ASEAN and the Indo-Pacific: Strategic Responses to Great Power Competition*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2022.
- Altermidya. "Activists Decry 'US Interference' after Surveillance Aircraft Crashes in Mindanao." *Diakses Oktober 2025*. <https://www.altermidya.net>.
- Camba, Alvin. "From Aquino to Marcos: Political Survival and Philippine Foreign Policy towards China." *Journal of Contemporary East Asia Studies* 12, no. 1 (2023): 9–31. <https://doi.org/10.1080/24761028.2023.2281165>.
- Chalk, Peter. *The Moro Conflict: Landlessness and Misdirected State Policies*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008.
- Council on Foreign Relations. *The U.S. Withdrawal from Afghanistan: Implications and Global Reactions*. 2021. <https://www.cfr.org/backgrounder/us-withdrawal-afghanistan-implications-global-reactions>.
- . "What the U.S. Withdrawal from Afghanistan Means for Asia." 2021. <https://www.cfr.org/in-brief/what-us-withdrawal-afghanistan-means-asia>.
- Heydarian, Richard Javad. *Asia's New Battlefield: U.S., China, and the Struggle for the Western Pacific*. London: Zed Books, 2017.
- International Crisis Group. *A New Lease on Life: The Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Asia Report No. 323)*. 2022.
- Katzenstein, Peter J., and Takashi Shiraishi, eds. *Network Power: Japan and Asia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997.
- Keohane, Robert O. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.
- Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. *Power and Interdependence*. 4th ed. New York: Longman, 2012.
- Krasner, Stephen D., ed. *International Regimes*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.
- Kurlantzick, Joshua. *Hedging in Asia: Southeast Asia's Balancing Act between the U.S. and China*. New York: Council on Foreign Relations, 2021.

<https://www.cfr.org/report/hedging-asia-southeast-asias-balancing-act-between-us-and-china>.

Manyin, Mark E. *U.S.-Philippine Relations (CRS Report R46823)*. Washington, DC: Congressional Research Service, 2022.

Maulidita, Siti Zahra, Salismi Zulfi, Novita Fauziah, and Indah Putri Hikmah. "Motivasi dan Apropriasi Taktik: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina." *Sentris: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2023): 135–145. <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i2.6489.135-145>.

McKenna, Thomas M. *Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines*. Berkeley: University of California Press, 1998.

Muhammadiyah.or.id. "Kunjungi DPR RI, Delegasi Muslim Bangsamoro Berterima Kasih Atas Peran Muhammadiyah Wujudkan Perdamaian di Filipina Selatan." Diakses Oktober 2025. <https://www.muhammadiyah.or.id>.

Parameswaran, Prashanth. "US-Philippine Counterterrorism Cooperation Gets Another Boost under Biden." *The Diplomat*, 2023. <https://thediplomat.com/2023/02/us-philippine-counterterrorism-cooperation-gets-another-boost-under-biden/>.

Republika. "Presiden Filipina Minta Militer Dukung Perdamaian Bangsamoro." Diakses Oktober 2025. <https://www.republika.co.id>.

Santoso, R. A., W. Hazizah, M. Rizky, S. P. Mahandry, Y. V. Gathari, M. I. Abdillah, and Rudiana. "Comparative of Governance in Terrorism Policy Implementation in Indonesia and Philippines." *Jurnal Kebijakan Publik* 16, no. 1 (2025): 52–59.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

U.S. Department of Defense. *Annual Report on Military Cooperation with the Philippines*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2023. <https://media.defense.gov/2023/Apr/27/2003190197/-1/-1/1/2023-military-cooperation-philippines.pdf>.

———. *Fact Sheet: U.S.-Philippines Alliance*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2023.

U.S. Department of State. *Country Reports on Terrorism 2022: Philippines*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2023.

———. *U.S. Security Cooperation with the Philippines*. 2023.
<https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-the-philippines>.

United Nations Development Programme. *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: Oxford University Press, 1994.

¹ Peter Chalk, *The Moro Conflict: Landlessness and Misdirected State Policies* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008), 5–8.

² Thomas M. McKenna, *Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines* (Berkeley: University of California Press, 1998).

³ Patricio N. Abinales and Donna J. Amoroso, *State and Society in the Philippines* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2005), 134–136

⁴ Zachary Abuza, *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005); McKenna, *Muslim Rulers and Rebels*.

⁵ Siti Zahra Maulidita et al., “Motivasi dan Apropriasi Taktik: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina,” *Sentris: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2023): 137–138.

⁶ McKenna, *Muslim Rulers and Rebels*, 24–25

⁷ Alvin Camba, “From Aquino to Marcos: Political Survival and Philippine Foreign Policy towards China,” *Journal of Contemporary East Asia Studies* 12, no. 1 (2023): 12.

⁸ Peter Chalk, *The Moro Conflict*, 13–14.

⁹ International Crisis Group, *A New Lease on Life*, 8–9.

¹⁰ Peter J. Katzenstein and Takashi Shiraishi, eds., *Network Power: Japan and Asia* (Ithaca: Cornell University Press, 1997); U.S. Department of State, “U.S. Security Cooperation with the Philippines,” 2023; Richard Javad Heydarian, *Asia’s New Battlefield: U.S., China, and the Struggle for the Western Pacific* (London: Zed Books, 2017).

¹¹ Council on Foreign Relations, *The U.S. Withdrawal from Afghanistan: Implications and Global Reactions* (2021), 4–5.

¹² Vinod K. Aggarwal and Jonghyuk Lee, “Afghanistan and the Future of US Credibility in Asia,” *ISEAS Perspective* (2022), 2–3.

¹³ Council on Foreign Relations, *The U.S. Withdrawal from Afghanistan: Implications and Global Reactions* (2021), 2–3.

¹⁴ Vinod K. Aggarwal and Jonghyuk Lee, *Afghanistan and the Future of US Credibility in Asia* (Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2022), <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/afghanistan-and-the-future-of-us-credibility-in-asia/>

¹⁵ U.S. Department of State, *Country Reports on Terrorism 2022: Philippines* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2023), 15–17.

¹⁶ U.S. Department of Defense, *Annual Report on Military Cooperation with the Philippines* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2023), 15–17
<https://media.defense.gov/2023/Apr/27/2003190197/-1/-1/1/2023-military-cooperation-philippines.pdf>

¹⁷ Joshua Kurlantzick, *Hedging in Asia: Southeast Asia’s Balancing Act between the U.S. and China* (New York: Council on Foreign Relations, 2021),

<https://www.cfr.org/report/hedging-asia-southeast-asias-balancing-act-between-us-and-china>

¹⁸ R. A. Santoso, W. Hazizah, M. Rizky, S. P. Mahandry, Y. V. Gathari, M. I. Abdillah, and Rudiana, "Comparative of Governance in Terrorism Policy Implementation in Indonesia and Philippines," *Jurnal Kebijakan Publik* 16, no. 1 (2025): 52

¹⁹ Salismi Zulfi Maulidita, Novita Fauziah, and Indah Putri Hikmah, "Motivasi dan Apropriasi Taktik: Studi Kasus Kelompok Abu Sayyaf di Filipina," *Sentris: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2023): 135–145.

²⁰ Alvin Camba, "From Aquino to Marcos: Political Survival and Philippine Foreign Policy towards China," *Journal of Contemporary East Asia Studies* 12, no. 1 (2023): 9–31.

²¹ Alvin Camba, "From Aquino to Marcos: Political Survival and Philippine Foreign Policy towards China," *Journal of Contemporary East Asia Studies* 12, no. 1 (2023): 9–31.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 213.

²³ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton: Princeton University Press, 1984), 65-69

²⁴ Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes* (Ithaca: Cornell University Press, 1983), 2

²⁵ Keohane, *After Hegemony*.

²⁶ Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Interdependence*, 4th ed. (New York: Longman, 2012).

²⁷ International Crisis Group, *A New Lease on Life: The Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao* (Asia Report No. 323, 2022).

²⁸ Council on Foreign Relations, "What the U.S. Withdrawal from Afghanistan Means for Asia," 2021.

²⁹ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton: Princeton University Press, 1984), 65-69

³⁰ Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes* (Ithaca: Cornell University Press, 1983), 2

³¹ Altermidya, "Activists Decry 'US Interference' after Surveillance Aircraft Crashes in Mindanao," diakses Oktober 2025, <https://www.altermidya.net>

³² Republika, "Presiden Filipina Minta Militer Dukung Perdamaian Bangsamoro," diakses Oktober 2025, <https://www.republika.co.id>

³³ Muhammadiyah.or.id, "Kunjungi DPR RI, Delegasi Muslim Bangsamoro Berterima Kasih Atas Peran Muhammadiyah Wujudkan Perdamaian di Filipina Selatan," diakses Oktober 2025, <https://www.muhammadiyah.or.id>

³⁴ U.S. Department of Defense, *Fact Sheet: U.S.-Philippines Alliance* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2023).

³⁵ Manyin, Mark E., *U.S.-Philippine Relations* (CRS Report R46823, Congressional Research Service, 2022).

³⁶ U.S. Department of Defense, *Annual Report on Military Cooperation with the Philippines*, 2023. 11